

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan tata kelola penyelenggaraan pelaporan keuangan daerah di setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan. Jika sebelumnya sistem pelaporan keuangan dilakukan secara manual atau tradisional. Pada Saat ini telah menggunakan aplikasi yang merupakan sistem informasi yang memuat keseluruhan data pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Saat ini rata-rata semua organisasi baik yang mencari laba (profit) atau instansi pemerintah menggunakan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan keuangan.

Sistem informasi telah berkembang seiring berjalannya perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintahan, dunia usaha dan mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah memberikan laporan keuangan wajib disajikan dengan berkualitas, begitu banyak yang mengandalkan suatu informasi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintahan daerah dengan kepentingan yang berbeda. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010 yang menggunakan laporan keuangan pemerintahan yaitu masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, mereka yang berperan atau memberi dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi serta pihak pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan memiliki kualitas karakteristik yaitu relevan,

handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Proses mengelola keuangan daerah dalam suatu instansi tentunya harus disusun dengan semaksimal mungkin agar memperoleh pengelolaan keuangan yang efektif (Ikriyati & Aprila, 2019).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang baik menuntut pemerintah untuk memiliki teknologi informasi yang baik agar dapat mengakses dan mengelola informasi serta menggunakannya secara cepat, akurat, dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah tertarik menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik baik pemerintah pusat maupun daerah.

Saat ini teknologi dapat memberikan informasi yang akurat, relevan dan lengkap sangat diperlukan. Sistem informasi cukup penting pada sebuah sektor publik atau instansi pemerintahan adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah proses mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses akuntansi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan (Marshall B. Romney, 2019). Sistem informasi akuntansi ini dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang berharga. Laporan keuangan memberikan informasi tentang keadaan keuangan instansi termasuk aset, kewajiban dan kekayaan bersihnya. Informasi ini dapat digunakan untuk menilai kesehatan suatu lembaga atau instansi serta memberikan gambaran umum tentang kondisi keuangan secara keseluruhan (Astuti, 2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1 menyatakan laporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan entitas, kinerja keuangan dan arus kas. Informasi ini berguna bagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mempengaruhi sistem informasi akuntansi setiap organisasi bisnis, terutama dalam pengolahan data yang telah berubah dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi sebagai sarana pengolahan data. Penggunaan teknologi informasi di era saat ini merupakan elemen penting dalam aktivitas perusahaan, baik swasta maupun instansi pemerintahan. Sistem informasi tentunya membawa pengaruh besar terhadap hampir semua aspek dalam pengelolaan termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Perkembangan akuntansi sektor publik saat ini, wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan instansi pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja

kepada publik. Organisasi sektor publik yang berkaitan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang dalam bentuk laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas (Ayu Enny Kiranayanti & Made Adi Erawati. Ni, 2016).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel tentu pimpinan instansi harus melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pemerintah daerah tentu memiliki tujuan rencana kerja yang sudah tercantum dalam sebuah rencana kerja untuk jangka waktu yang sudah ditentukan yang kemudian dibuatlah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja tersebut. Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk membantu memastikan bahwa tujuan pemerintah daerah terpenuhi, seperti keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (Aditya & Surjono, 2017). Pemerintah telah berusaha untuk pemberlakuan kewajiban kepada semua instansi dalam hal ini sebagai pihak- pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pengguna laporan keuangan yakni masyarakat, anggota parlemen, badan pengawas serta pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Pratiwi et al., 2018).

Laporan keuangan merupakan topik yang sangat menarik pada saat ini, karena terdapat perusahaan swasta maupun instansi pemerintah telah mengalami banyak kerugian akibat kesalahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Terdapat 45 OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) pada Provinsi Jambi yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Terdapat tidak adanya sinkron data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi antara Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) karena kedua Sistem tersebut memiliki sifat yang berbeda. Selain itu penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi masih dilakukan secara bertahap, karena masih memunculkan beberapa kendala teknis yang dapat membuat tidak berjalannya pengelolaan keuangan daerah sehingga akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan yaitu sering terjadi keterlambatan dalam

penyerahan laporan keuangan dan lemahnya sistem informasi akuntansi serta ketidakcocokan neraca pada akun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Tabel 1.1 Perbedaan SIMDA dan SIPD

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Memiliki sifat terinci/Akrual	Memiliki sifat garis besar (global)
Contoh: Akun Biaya Perjalanan Dinas Pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) akun ini di input dengan serinci-rincinya seperti berapa hari perjalanan dinas dilakukan, tujuan perjalanan dinas kemana dipaparkan dengan jelas.	Contoh: Akun Biaya Perjalanan Dinas Pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) akun ini di input hanya secara garis besar berupa anggaran perjalanan selama periode.
SIMDA dimanfaatkan untuk mengelola keuangan dan kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan kinerja	SIPD dimanfaatkan mencakup semua aspek anggaran pemerintah daerah mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga penatausahaan yang secara transparansi

Sumber : Data Bagian Keuangan mengenai SIMDA dan SIPD,2022

Pada masa pimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sekarang terdapat sering memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang berprestasi. Salah satu bentuk apresiasi yang diberikan adalah kepada pemenang lomba pengelolaan arsip dinamis pada beberapa bidang yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah menjalankan tugas pengarsipan dengan maksimal. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi juga memberikan cendera mata dan penghargaan kepada karyawan yang telah memasuki masa purna bakti. Serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi juga melakukan pengalungan medali PON XX Papua tahun 2021 yang diperoleh oleh salah satu anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi melalui cabor tinju. Dengan beberapa bentuk apresiasi yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan salah satu wujud untuk membuat kinerja pegawai lebih baik serta memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan pekerjaan serta tugas yang dimiliki.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki 9 bidang diantaranya sekretaris, bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang cipta karya, bidang perumahan, bidang bidang bina konstruksi, bidang bina program dan tata ruang, UPTD workshop dan peralatan serta UPTD laboratorium bahan konstruksi. Dengan adanya beberapa bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tentunya proses pelaporan keuangan tetap dilakukan setiap bidang tetapi tetap bermuara pada bagian keuangan dalam hal ini laporan induk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Pada sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi juga dapat mempengaruhi kualitas dari suatu laporan keuangan. Dengan sistem informasi akuntansi yang akurat, relevan dan lengkap akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Jannah, 2020). Hal ini didukung dalam penelitian Efriany Zarlin dan Siti Khairani (2017) dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin dapat bekerja secara optimal, produktif, komprehensif, mandiri, tepat waktu dan yang terpenting dapat bekerja sama sebagai satu tim sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dibandingkan. Tetapi hasil penelitian dari Efriany Zarlin dan Siti Khairani (2017) belum tentu sesuai atau sama dengan hasil penelitian ini, karena adanya perbedaan yaitu perbedaan tahun pelaksanaan dan fenomena yang berbeda.

Keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dari bagaimana instansi pemerintah menggunakan teknologi sistem informasi untuk memberikan kegunaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan itu sendiri. Salah satu sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat berjalan dengan baik dan tanpa kesalahan apabila terdapat sumber daya manusia yang berbakat menjadi kekuatan pendorong dibelakang sistem informasi akuntansi.

Hubungan antara kualitas laporan keuangan, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kinerja pegawai memang sangatlah penting karena dalam suatu instansi atau lembaga membutuhkan keempatnya untuk menjalankan tugas instansi tersebut. Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan menjadi hal yang menarik untuk diketahui faktor yang dapat mempengaruhinya, penelitian Nurendah Ragillita Untary dan Moh Didik Ardiyanto (2015) terdapat sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal serta kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, pada penelitian (Yussilasari Fitriyah & Pituringsih, 2016) dengan peningkatkan standar akuntansi pemerintahan

oleh pengelola keuangan, kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan kinerja pegawai akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hal ini justru berbanding terbalik pada penelitian (Tampaty et al., 2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. semakin baik pemanfaatan teknologi informasi pada satuan kerja perangkat daerah namun semakin rendah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Jika benar terdapat tidak adanya sinkron data antara kedua sistem yang digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tentunya akan menjadi pertanyaan apakah Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Pegawai akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, sebab itu dalam penelitian ini dilakukan bermaksud untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kinerja pegawai terhadap karakteristik laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi?
3. Apakah Kinerja Pegawai berpengaruh terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi?
4. Apakah Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pegawai berpengaruh terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pegawai terhadap Karakteristik Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi dalam penelitian lainnya mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kinerja pegawai terhadap karakteristik laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu membantu para pembaca untuk mencari referensi mengenai topik yang berkaitan.

c. Bagi Instansi

Bagi pihak instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kinerja pegawai terhadap karakteristik laporan keuangan